



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 maka Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Batang.



3. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
  4. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perubahan maupun yang belum dirubah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012–2017.
  6. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

3. Lampiran I dan Lampiran II dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 20 Juli 2016

ttd

BUPATI BATANG,

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR: 31 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 64  
 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						SUMBER DATA
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya profesionalitas aparatur dan terciptanya perencanaan yang berkualitas	a. Jumlah Kegiatan Bintek (kali)	2	2	3	2	2	3	BAPPEDA
		b. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPPEDA
		c. Kesesuaian antara perencanaan program dan pelaksanaan program (%)	71,27%	75,75%	75,76%	75,77%	75,78%	75,79%	BAPPEDA
2	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan daerah	a. Kesesuaian antara perencanaan program dan	71,27	75,75	100	100	100	100	BAPPEDA
		b. Tersedianya Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
		c. Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
		d. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
		e. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
		f. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERBUP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPEDA
3	Meningkatnya layanan dan informasi publik	a. Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	4	4	5	5	5	5	DINHUBKOMINFO
		b. Jumlah jaringan komunikasi	25	48	71	94	117	140	DINHUBKOMINFO
		c. Web site milik pemerintah daerah	10	20	30	40	50	66	DINHUBKOMINFO
		d. Jumlah surat kabar nasional/lokal	6	12	12	12	12	12	BAG. HUMAS
		e. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0	12	12	12	12	12	DINHUBKOMINFO
		f. Jumlah penyiaran radio/TV lokal	4	4	5	5	5	5	BAG. HUMAS
4	Terciptanya inovasi dan transparansi pemerintah daerah	a. Web site milik pemerintah daerah (buah)	10	20	30	40	50	66	DINHUBKOMINFO
		b. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi	12	12	12	12	12	12	BAG. HUMAS
		c. Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3,3	3,63	3,99	4,38	4,8	5,28	KANPERPAR



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
5	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	2	2	4	3	3	4	KESBANGPOL
		b. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	4,6	4,8	5	5	5	5	SATPOL PP
		c. Rasio poskamling per desa/kelurahan	6,18	6,26	6,34	6,46	6,54	6,66	SATPOL PP
		d. Jumlah Demo	5	7	5	6	5	7	KESBANGPOL
6	Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi	a. Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	2	2	3	2	2	3	KESBANGPOL
		b. Jumlah LSM	68	90	105	110	115	115	KESBANGPOL
		c. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan	2	2	4	3	3	4	KESBANGPOL
7	Meningkatnya penanaman modal di daerah	a. Jumlah realisasi nilai investasi (Milyar Rp)	114,00	120,52	126,54	132,87	139,52	146,49	BPMPT
		b. Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang	500	500	500	500	500	500	BPMPT
		c. Jumlah penyerapan tenaga kerja	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BPMPT
		d. Jumlah ijin usaha yang diterbitkan	2.700	2.800	2.900	3000	3100	3500	BPMPT
8	Meningkatnya penyerapan kerja diberbagai sektor	a. Tingkat pengangguran Terbuka (%)	5,9	6,98	6,88	6,78	6,68	6,58	DINSOSNAKERTRANS
		b. Pencari kerja yang ditempatkan	31%	23%	50%	50%	50%	50%	DINSOSNAKERTRANS
		c. Keselamatan dan perlindungan	20%	25%	30%	35%	40%	45%	DINSOSNAKERTRANS
9	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi kesejahteraan rakyat antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional	a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1	1	2	3	2	2	DISPERINDAGKOP
		b. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	16,19%	16,19%	15,99%	16,00%	16,09%	16,12%	DISPERINDAGKOP
		c. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	17,14%	16,65%	16,49%	16,61%	16,66%	16,71%	DISPERINDAGKOP
		d. Ekspor Bersih Perdagangan	48.175.518	48.175.518	54.093.069	54.182.287	65.452.614.0	71.997.875.4	DISPERINDAGKOP
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri bagi kesejahteraan rakyat serta ramah terhadap lingkungan	a. Pertumbuhan Industri ( unit )	10.404	10.488	10,573	10,66	10,755	10,851	DISPERINDAGKOP
		b. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	25,61	26,02	25,6	25,75	26	26,05	DISPERINDAGKOP
		c. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK	27,62%	27,53%	27,16%	27,23%	27,30%	27,50%	DISPERINDAGKOP
		d. Pertumbuhan Industri.	10.404	10.488	10.573	10.660	10.755	10.851	DISPERINDAGKOP
		e. Jumlah Unit usaha sentra industri	212	216	215	230	240	255	DISPERINDAGKOP
		f. Persentase penanganan sampah (%)	58,39	58,26	62,38	67,74	73,57	79,89	DCKTR-ESDM
		g. Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	122	122	132	142	152	162	DCKTR-ESDM
		h. Jumlah daya tampung TPS	138,21	140,15	137,87	140,63	143,44	146,31	DCKTR-ESDM
		i. Rasio TPS per seribu penduduk	0,17	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	DCKTR-ESDM
11	Meningkatnya produksi dan kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian	a. Nilai tukar petani (%)	100	101,82	105,59	100	100,30	100,31	DISPERTANAK
		b. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	30,44	30,53	30,60	27	27	27,01	DISPERTANAK
		c. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	17,09	16,4	19,32	19,36	19,41	19,46	DISPERTANAK





NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		d. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK	4,57	13,84	15,78	15,82	15,86	15,90	DISPERTANAK
		e. Cakupan Bina Kelompok Peternak	42,9	43	47	57	63	69	DISPERTANAK
		f. Ketersediaan Lahan Ternak	78,70	78,70	80,28	83,52	85,19	86,89	DISPERTANAK
		g. Penyakit ternak yang tertangani :							DISPERTANAK
		- Jumlah ternak yang disuntik	600	600	675	725	750	775	DISPERTANAK
		- Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)	17,34	2,59	2,88	2,97	3,01	3,05	DISPERTANAK
		h. Produksi perikanan Tangkap	30.548	32.716	34.000	36.000	38.000	40.000	DISLUTKAN
		i. Produksi perikanan Budidaya	1.283,20	1.796,10	2.250,50	2.700,60	3.240,72	3.888,86	DISLUTKAN
		j. Cakupan bina kelompok pengawas	210	240	270	300	330	360	DISLUTKAN
		k. Tingkat Konsumsi ikan	14,00	24,17	27,00	30,00	33,00	35,00	DISLUTKAN
		l. Tingkat Pengelolaan Konservasi	Didirikan	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	Dikelola Optimum	DISLUTKAN
m. Cakupan bina kelompok Tangkap	40	49	59	61	63	65	DISLUTKAN		
n. Cakupan bina kelompok Budidaya	85	70	60	65	68	70	DISLUTKAN		
o. Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklhasar)	17	14	15	17	20	25	DISLUTKAN		
12	Terehabilitasinya lahan hutan yang kritis	a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	18,05	7,46	12	10	8	8	DISHUTBUN
		b. Kerusakan Kawasan Hutan	18,29	14,41	13,80	13,20	12,70	12,20	DISHUTBUN
13	Tersedianya kedaulatan pangan melalui produksi dan cadangan pangan utama dari sektor peternakan, kelautan dan perikanan	a. Populasi Hewan ternak (ekor)							
		- Sapi Perah	65	65	140	130	160	165	DISPERTANAK
		- Sapi Potong	23.150	27.967	17.500	18.500	19.000	20.000	DISPERTANAK
		- Kerbau	3.460	3.570	1.400	1.450	1.500	1.550	DISPERTANAK
		- Kambing	78.200	78.900	76.000	77.000	78.000	80.000	DISPERTANAK
		- Domba	39.500	40.200	30.500	30.600	32.500	33.500	DISPERTANAK
		- Ayam buras	701.600	709.300	650.300	600.000	752.715	767.769	DISPERTANAK
		- Ayam ras	3.686.250	3.455.952	9.455.952	12.000.000	19.000.000	24.000.000	DISPERTANAK
		- Itik	147.433	150.381	110.000	111.000	112.000	113.000	DISPERTANAK
		b. Produksi perikanan Tangkap (ton)	30.548	32.716	34.000	36.000	38.000	40.000	DISLUTKAN
		c. Produksi perikanan Budidaya (ton)	1.283,20	1.796,10	2.250,50	2.700,60	3.240,72	3.888,86	DISLUTKAN
		d. Ketersediaan pangan utama (ton)							
		- Beras	100.881	101.073	101.219	101.725	102.234	102.744	BPPKP
		- Jagung	39.998	40.554	38.569	38.954	39.343	39.737	BPPKP
		e. Produksi hasil ternak :							
- Daging	9.020.200	9.210.300	9.650.000	9.700.000	9.750.000	9.800.000	DISPERTANAK		
- Telur	3.850.500	3.910.500	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.100.000	DISPERTANAK		
- Susu	220.300	225.500	105.000	110.000	115.000	120.000	DISPERTANAK		
f. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	80	80	90	90	100	100	BPPKP		
g. Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	82	80	88	90	100	100	BPPKP		



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		h. Cadangan Pangan Daerah	4,00	9,00	14,00	19,00	24,00	29,00	BPPKP
		i. Ketersediaan energi dan protein per kapita							BPPKP
		- Energi per kapita	2.000	2.100	2.200	2.300	2.350	2.400	BPPKP
		- Protein per kapita	50	52	54	56	58	60	BPPKP
		j. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	81	82	83	84	84,5	85	BPPKP
		k. Penguatan cadangan pangan	4	5	5	5	5	5	BPPKP
		l. Stabilitas harga dan pasokan pangan	82	85	88	90	100	100	BPPKP
		m. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	BPPKP
		n. Penanganan Daerah Rawan Pangan	47	50	52	55	58	62	BPPKP
		o. Produktivitas Padi sawah	5,553	4,554	4,576	4,514	4,761	4,79	DISPERTANAK
		p. Produksi Padi	245.126	179.250	180.146	186.091	195.273	196.600	DISPERTANAK
		q. Produktivitas Jagung	5,065	6,265	6,270	6,144	6,415	6,496	DISPERTANAK
		r. Produksi Jagung	44.942	42.907	43.336	45.091	45.091	45.541	DISPERTANAK
		s. Jumlah Kelompok Tani Binaan	866	870	872	875	884	885	BPPKP
14	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis UMKM	a. Persentase koperasi aktif (%)	70	70,99	71	72	73	74	DISPERINDAGKOP
		b. Usaha Mikro dan Kecil (unit)	88.139	88.299	101.120	101.310	101.415	101.600	DISPERINDAGKOP
		c. Jumlah bank dan cabang	58	61	64	67	70	74	BAG. PEREKONOMIAN
		d. Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	4	5	5	6	6	7	BAG. PEREKONOMIAN
		e. Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,02	5,17	4,9-5,4	5,0-5,5	5,5-5,6	5,2-5,7	BAPPEDA
		f. Laju inflasi	3,83	8,08	7,65	5 ± 1	5 ± 1	4,5 ± 1	BAPPEDA
		g. PDRB per kapita ADHK	3,65	3,83	4,27	4,58	4,89	5,12	BAPPEDA
		h. Indeks Gini	0,310	0,300	0,305	0,305	0,304	0,304	BAPPEDA
		i. Indeks Pembangunan Manusia	71,41	72,03	72,52	73,01	73,51	74,01	BAPPEDA
		j. Presentase Penduduk Miskin	12,4	11,96	11,86	11,76	11,66	11,56	BAPPEDA
15	Terwujudnya pengembangan sektor pariwisata dan budaya lokal	a. Kunjungan Wisata	426.495	430.123	433.751	437.379	441.007	444.635	DISBUDPAR
		b. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	12	12	12	12	12	12	DISBUDPAR
		c. Obyek Wisata yang ditangani	5	5	5	5	5	5	DISBUDPAR
		d. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	750 juta	750 juta	800 juta	850 juta	900 juta	1 milyar	DISBUDPAR
		e. Jumlah grup kesenian	450	498	520	535	550	565	DISBUDPAR
		f. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1	2	DISBUDPAR
		g. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	309	312	312	314	317	320	DISBUDPAR
		h. Jenis, kelas, dan jumlah restoran	74	78	82	86	90	94	DISBUDPAR
		i. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	4	8	8	9	9	10	DISBUDPAR
16	Tersedianya sarana prasarana dan akses penunjang perekonomian	a. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	75	80	85	90	95	95	DBM-SDA
		b. Panjang jalan Kondisi Baik	434,65	463,62	492,60	521,58	550,55	550,55	DBMSDA
		c. Panjang Jalan Seluruhnya	579,53	579,53	579,53	579,53	579,53	579,53	DBMSDA
		d. Panjang Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik	64,44	67,78	70,00	75,11	80,00	80,00	DBMSDA
		e. Panjang Seluruh Jalan Kab. Didaerah tsb	450	450	450	450	450	450	DBMSDA
		f. Persentase Luas irigasi Kab dalam kondisi baik (%)	66,71	71,6	78,27	80,05	83,16	83,16	DBM-SDA



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		g. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	15.002	16.101	17.601	18.002	18.701	18.701	DBMSDA
		h. Luas Seluruh irigasi Kabupaten	22.488	22.488	22.488	22.488	22.488	22.488	DBMSDA
		i. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	95,64%	95,88%	96,00%	96,20%	96,40%	96,60%	DBMSDA
		j. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per seribu penduduk	0,17	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	DCKTR-ESDM
		k. Rasio rumah layak huni	86,1	87,5	88,8	89,5	90,5	91,5	DCKTR-ESDM
		l. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	31,05%	31,05%	33,63%	34,47%	35,33%	36,21%	DCKTR-ESDM
		m. Lingkungan Pemukiman	15,36	17,59	19,82	22,05	24,28	26,51	DCKTR-ESDM
17	Terwujudnya energi dan penataan ruang yang teratur	a. Ketaatan terhadap RTRW, (%)	95	95	100	100	100	100	DCKTR-ESDM
		b. Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (ha)	2,99	3,58	7,46	10,45	14,63	20,48	DCKTR-ESDM
		c. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	5,28	1,33	1,11	1,5	1,15	1,2	DCKTR-ESDM
		d. Luas wilayah produktif	79,85	79,85	84,74	86,43	88,16	89,92	DCKTR-ESDM
		e. Luas wilayah industri	1,49	1,51	1,57	1,60	1,63	1,67	DCKTR-ESDM
		f. Luas wilayah banjir	0,11	0,11	0,10	0,9	0,8	0,7	DCKTR-ESDM
		g. Luas wilayah perkotaan	14,38	14,38	15,26	15,57	15,88	16,19	DCKTR-ESDM
18	Tersedianya perumahan layak huni dan kepemilikan tanah bagi masyarakat	a. Rasio Rumah layak huni (%)	86,1	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	DCKTR-ESDM
		b. Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	45,96	46,5	48	50	52	55	DCKTR-ESDM
		c. Persentase penduduk yang memiliki lahan (%)	57,3	60,27	61,57	63,29	65,01	66,73	DCKTR-ESDM
		d. Rumah tangga pengguna air bersih	68,51%	68,50%	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	DCKTR-ESDM
		e. Rumah tangga ber-Sanitasi	45,96%	46,50%	48,00%	50,00%	52,00%	55,00%	DCKTR-ESDM
		f. Lingkungan pemukiman kumuh	0,41	0,25	0,22	0,20	0,18	0,15	DCKTR-ESDM
		g. rasio Rumah layak huni	86,10%	87,50%	88,5%	89,5%	90,5%	91,5%	DCKTR-ESDM
		h. Persentase pemohon sertifikat	100%	95,6%	100%	100%	100%	100%	BPN/TAPEM
		i. Prona (Program Nasional)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM
19	Tersedianya sarana perhubungan yang memadai dan transportasi publik yang	a. Rasio ijin trayek	0,63	0,63	0,63	0,65	0,66	0,67	DINHUBKOMINFO
		b. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis,							
		- PelabuhanLaut	1	1	1	1	1	1	DINHUBKOMINFO
		- Pel. Lokal	1	2	3	3	3	3	DINHUBKOMINFO
		- Terminal B	1	1	1	1	1	1	DINHUBKOMINFO
		- Terminal C	8	8	8	8	9	9	DINHUBKOMINFO
		c. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	DINHUBKOMINFO
		d. Jumlah orang terangkut angkutan umum	14.916.997	14.917.520	14.639.040	10.022.000	10.121.397	10.130.471	DINHUBKOMINFO
		e. Jumlah orang melalui terminal per tahun	14.916.997	14.917.520	14.639.040	10.022.000	10.121.397	10.130.471	DINHUBKOMINFO
		f. Jumlah arus penumpang angkutan umum	14.916.997	14.917.520	14.639.040	10.022.000	10.121.397	10.130.471	DINHUBKOMINFO
		g. Jumlah uji kir angkutan umum	1.050	1.056	1.062	1.070	1.070	1.076	DINHUBKOMINFO
		h. Angkutan darat	3.520	3.520	3.530	3.535	3.540	3.550	DINHUBKOMINFO
		i. Kepemilikan KIR angkutan umum	525	528	531	535	540	545	DINHUBKOMINFO





NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		j. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65	65	65	65	65	65	DINHUBKOMINFO
		k. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	DINHUBKOMINFO
20	Tertanganinya PMKS melalui bantuan sosial dan pemberdayaan	a. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan	0,29	0,15	70	75	75	80	DINSOSNAKERTRANS
		b. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	2,43	18,72	30	35	35	40	DINSOSNAKERTRANS
21	Terwujudnya penyelenggaraan KB KS	a. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	127.848	125.287	123.920	122.552	121.184	119.816	BPPKB
		b. Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	BPPKB
		c. Rasio akseptor KB	83,49%	80,85%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	BPPKB
		d. Cakupan peserta KB aktif	133.942	131.618	134.445	137.272	140.099	142.926	BPPKB
		e. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-	78,9%	80,3%	81,0%	81,5%	82,0%	82,5%	BPPKB
		f. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	82,8%	86,3%	83,0%	84,0%	86,0%	87,0%	BPPKB
		g. Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	102%	102%	100%	100%	100%	100%	BPPKB
22	Terwujudnya administrasi kependudukan yang baik serta penyelenggaraan transmigrasi	a. Kepemilikan KTP el (%)	86	87	87	88	89	90	DISDUKCAPIL
		b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	432	437	467	497	527	557	DISDUKCAPIL
		c. Pengiriman Transmigran (KK)	15	8	9	10	15	15	DINSOSNAKERTRANS
		d. Jumlah KTP el yang diterbitkan per tahun	455.543	15.961	14.212	14.285	14.723	15.888	DISDUKCAPIL
		e. Rasio bayi ber-akta Kelahiran	0,50	0,55	0,77	0,89	0,90	0,91	DISDUKCAPIL
		f. Rasio pasangan berakta nikah	100	100	100	100	100	100	DISDUKCAPIL
		g. Rasio Akta Kematian	0,50%	0,70%	0,90%	1,00%	1,20%	1,50%	DISDUKCAPIL
		h. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	DISDUKCAPIL
23	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga	a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (%)	2,02	1,94	1,94	1,94	1,95	1,95	BKD
		b. Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	2	3	5	5	6	6	DISDIKPORA
		c. Jumlah kegiatan olahraga (kali)	2	7	4	5	5	5	DISDIKPORA
		d. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,02%	1,94%	1,94%	1,94%	1,95%	1,95%	BKD
		e. Partisipasi perempuan di lembaga swasta	178.409	181.058	192.914	194.216	195.526	196.845	DINSOSNAKERTRANS
		f. Rasio KDRT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	BPPKB
		g. Partisipasi angkatan kerja perempuan	182.086	184.642	196.577	197.933	199.299	200.674	DINSOSNAKERTRANS
		h. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPPKB
		i. Jumlah Organisasi Pemuda	10	10	14	14	15	15	DISDIKPORA
		j. Jumlah Organisasi Olahraga	25	27	34	38	38	40	DISDIKPORA
		k. Jumlah Lapangan Olahraga Tingkat Daerah	3	6	10	12	16	20	DISDIKPORA



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		I. Jumlah Klub Olahraga	230	235	240	245	245	250	DISDIKPORA
		m. Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4	5	5	DISDIKPORA
24	Terwujudnya jaminan penyelenggaraan kesehatan masyarakat	a. Angka usia harapan hidup (tahun)	70,57	70,97	70,97	70,98	70,99	71	DINKES
		b. Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	DINKES
		c. Kasus Kematian Ibu	25	14	19	18	17	16	DINKES
		d. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13,14	14,85	13	12,5	12	11,5	DINKES
		e. Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	14,72	18,12	17	16,50	16	15,50	DINKES
		f. Incident rate DBD per 100.000 penduduk	38,00	61,70	<20	<20	<20	<20	DINKES
		g. Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk	0,67	0,85	<1	<1	<1	<1	DINKES
		h. Prevalensi kekurangan gizi (Gizi buruk dan gizi kurang)	12,36%	11,83%	11,70%	11,00%	10,70%	10,50%	DINKES
		i. Prevalensi Penderita TBC BTA positif per 100.000 penduduk	84,32%	80,31%	79,00%	78,00%	77,00%	76,00%	DINKES
		j. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	RSUD
25	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga	5	5	5	5	5	5	BAPERMADES
		b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)	68	68	68	68	68	68	BAPERMADES
		c. LPM Berprestasi	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	BAPERMADES
		d. PKK Aktif	95%	95%	96%	97%	98%	100%	BAPERMADES
		e. Posyandu Aktif	89%	93%	100%	100%	100%	100%	BAPERMADES
		f. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	2%	3%	4%	5%	6%	7%	BAPERMADES
26	Meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan pengembangan SDM	a. Angka Melek Huruf (%)	89,93	90,67	92	95	98	100	DISDIKPORA
		b. Rata Rata Lama Sekolah (tahun)	6,73	6,74	6,8	6,9	7	7,2	DISDIKPORA
		c. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (orang)	114.578	205.302	153.810	168.810	183.810	198.810	KANPERPAR
		d. Pengelolaan arsip secara baku (%)	55	57	59,8	67,3	74,8	82,3	KANPERPAR
		e. Jumlah perpustakaan daerah	1	1	1	1	1	1	KANPERPAR
		f. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun	114.578	205.302	153.810	168.810	183.810	198.810	KANPERPAR
		g. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	45.375	49.713	47.375	48.375	49.375	50.375	KANPERPAR
		h. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	53,30	56,14	60,00	63,30	66,14	70,00	DISDIKPORA
		i. Angka Putus Sekolah							
		- Angka Putus Sekolah SD/MI	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	DISDIKPORA
		- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	DISDIKPORA
		- Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,63	0,58	0,48	0,34	0,24	0,10	DISDIKPORA
		j. Angka Kelulusan							



NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SUMBER DATA	
			2012	2013	2014	2015	2016		2017
		- Angka Kelulusan SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		- Angka Kelulusan SMP/MTs	98,85	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,91	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	90,19	92,11	100,00	100,00	100,00	100,00	DISDIKPORA
		- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	54,96	62,13	68,10	70,15	75,10	80,00	DISDIKPORA
		k. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	62,50	66,25	71,50	77,25	80,00	83,75	DISDIKPORA
		l. Angka Partisipasi Kasar							
		- Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	103,15	104,10	104,50	104,75	104,85	105,00	DISDIKPORA
		- Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	89,50	90,50	91,75	93,00	94,00	95,00	DISDIKPORA
		- Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Paket C	40,03	43,35	46,50	49,22	52,25	55,00	DISDIKPORA
		m. Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk							
		- Jenjang SD/Sederajat	40,00	42,65	45,12	48,56	50,12	52,00	DISDIKPORA
		- Jenjang SMP/Sederajat	13,00	13,12	14,18	16,11	18,12	20,00	DISDIKPORA
		- Jenjang SMA/Sederajat	7,50	7,90	8,18	8,50	9,00	9,20	DISDIKPORA
		n. Angka Partisipasi Murni							
		- Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	90,10	91,15	92,10	93,64	94,16	95,00	DISDIKPORA
		- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	65,10	70,12	75,63	78,15	80,68	82,66	DISDIKPORA
		- Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Paket C	37,38	39,15	41,75	43,14	47,89	50,00	DISDIKPORA

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

